

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976), sebagaimana dikutip oleh Edi Pranyoto et al. (2023), menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama prinsipal, termasuk memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi prinsipal. Menurut Iqbal Bukhori (2012) dalam Safiga dan Prisila (2024), teori keagenan adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan tanggung jawab kepada agen untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen, yang harus bertindak rasional demi kepentingan prinsipal.

Niamianti et al. (2021) menyatakan bahwa teori keagenan digunakan untuk menjelaskan interaksi antara manajemen dan pemegang saham, yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan manajemen. Dengan mempekerjakan manajemen untuk menjalankan tugas dan membuat keputusan, pemegang saham dalam hubungan ini mencapai pemahaman. Agar pemilik usaha dapat memperoleh manfaat dari hubungan ini, manajemen perlu menyusun kebijakan bisnis. Namun, dalam kenyataannya, proses peningkatan nilai perusahaan sering kali menimbulkan masalah antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham), di mana agen sering mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan tujuan perusahaan, yang dapat mengabaikan kepentingan prinsipal. Kesenjangan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini dikenal sebagai konflik keagenan (Hariati & P, 2020).

Teori keagenan muncul karena adanya tiga asumsi mengenai sifat manusia, yaitu: manusia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan orang lain (self-interest), manusia memiliki batasan dalam memahami peristiwa yang akan datang (bounded rationality) dan cenderung berusaha menghindari risiko yang mungkin muncul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diterapkan (risk averse). Berdasarkan asumsi tersebut, individu sebagai agen akan bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri (Subiyanto & Amanah, 2021).

Godfrey dalam Hery (2017) mengungkapkan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem) karena adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Hubungan ini bisa menyebabkan asimetri informasi, di mana manajer umumnya memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan pemiliknya. Ketidakseimbangan distribusi informasi antara prinsipal dan agen ini menimbulkan dua masalah utama, yaitu :

- A. **Moral Hazard** : Masalah yang muncul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
- B. **Adverse Selection** : Situasi di mana prinsipal tidak dapat memastikan apakah keputusan yang diambil agen benar-benar berdasarkan informasi yang diperoleh dengan baik, atau akibat kelalaian dalam tugas yang dilakukan agen.

Selain itu, hubungan keagenan juga dapat memicu konflik kepentingan (conflict of interest) yang muncul akibat perbedaan tujuan antara manajemen dan pemilik. Manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Pemilik perusahaan atau pemegang saham berfokus pada peningkatan keuntungan mereka melalui pembagian dividen, sementara manajemen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi melalui kompensasi. Kondisi ini sering kali mendorong

manajemen untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, namun tidak selalu efektif untuk perusahaan (Hery, 2017) dalam Afa Jauza Dhifa (2024).

Kaitan teori keagenan dengan kinerja keuangan memiliki kaitan langsung dengan kinerja keuangan perusahaan karena pengelolaan hubungan antara prinsipal dan agen yang tidak sejalan bisa menurunkan efektivitas operasional dan keputusan strategis perusahaan, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan. Sebaliknya, jika hubungan keagenan dikelola dengan baik melalui pengawasan dan insentif yang tepat, maka kinerja keuangan perusahaan dapat terjaga dan bahkan meningkat.

2.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori Stakeholder berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, melainkan harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat (Huang & Kung, 2010) dalam Supami & Mardiana (2020). Menurut Deegan (2004) yang dikutip dalam Susanti et al. (2021), teori ini menekankan bahwa akuntabilitas organisasi tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan atau ekonomi, tetapi juga mencakup kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual. Organisasi cenderung secara sukarela mengungkapkan informasi terkait aspek-aspek ini untuk memenuhi harapan nyata atau yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, melebihi kewajiban yang diharuskan.

Stakeholder mencakup semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang memiliki hubungan dengan perusahaan, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakeholder mencakup berbagai pihak seperti pemerintah,

pesaing perusahaan, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, lembaga eksternal (seperti LSM), lembaga yang peduli terhadap lingkungan, karyawan perusahaan, kelompok minoritas, dan lain-lain, yang keberadaannya memiliki dampak signifikan pada perusahaan dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Teori stakeholder juga merupakan suatu konsep dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (AY Saputri, B Setiyono, 2019). Dalam kerangka teori stakeholder, perusahaan secara sukarela akan membagikan informasi terkait kinerja lingkungan, sosial, dan intelektualnya untuk memenuhi harapan dari para pemangku kepentingan (Wardani & Sa'adah, 2020).

Teori stakeholder menegaskan bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangannya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terhubung dengan perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan pemerintah. Dalam hal kinerja keuangan, teori ini berpendapat bahwa memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan.

Ulum (2017: 35) dalam Nur Rizki et al. (2023) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari teori ini adalah agar manajemen perusahaan dapat lebih memahami lingkungan stakeholder mereka dan mengelola hubungan tersebut secara lebih efektif. Tujuan yang lebih luas adalah untuk meningkatkan nilai dari dampak aktivitas perusahaan sambil meminimalkan potensi kerugian bagi stakeholder yang mungkin terjadi.

2.3 Kinerja Keuangan (Financial Performance)

Kinerja keuangan adalah metode pengukuran yang digunakan oleh pembaca laporan keuangan untuk menilai atau mengidentifikasi kualitas suatu perusahaan. Dengan demikian, melalui laporan keuangan, keberhasilan perusahaan dapat dilihat, posisi keuangan dapat dipahami, dan hasil yang dicapai dalam periode tertentu dapat diketahui. Laporan keuangan ini juga berfungsi sebagai alat analisis bagi investor.

Menurut Setiyowati & Mardiana (2020), kinerja perusahaan menggambarkan seberapa baik perusahaan menerapkan regulasi keuangan yang tepat, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Sementara itu, menurut Mistari et al. (2022), kinerja keuangan didefinisikan sebagai ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang tercermin dalam data laporan laba rugi, neraca, dan pos-pos lain yang mendukung evaluasi kinerja keuangan. Wahyuningsih (2022) juga menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan ukuran yang digunakan oleh entitas untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba.

Kinerja keuangan adalah analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan berhasil mencapai tujuannya dengan menerapkan aturan-aturan secara benar dan efektif, serta untuk mengukur prestasi keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Indikator yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan bergantung pada posisi perusahaan (Fahmi, 2014: 2) dalam Afa Jauza Dhifa (2024). Dalam menganalisis kinerja keuangan, peneliti menggunakan rasio profitabilitas, yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terkait dengan penjualan, total aset, atau ekuitas. Tingkat profitabilitas dapat diukur melalui berbagai variabel, seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur besaran profitabilitas perusahaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Return on Assets (ROA)

ROA (Return on Assets) menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak disebut sebagai Return on Assets (ROA). Nilai ROA yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya, yang berarti bahwa dengan jumlah aset yang sama, perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2015 dalam Maya & Mia, 2022).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Return on Equity (ROE)

ROE adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menghitung seberapa besar keuntungan yang menjadi hak dari pemilik modal sendiri. Rasio ini dihitung dengan membagi laba neto dengan ekuitas saham biasa.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Margin Operasi

Margin operasi adalah rasio yang mengukur laba operasi, atau laba sebelum bunga dan pajak (EBIT), yang dihasilkan dari setiap unit penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasi dengan total penjualan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Margin Laba

Margin laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan biaya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

5. Return on Investment

ROI (Return on Investment) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya investasi yang telah dikeluarkan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba atas Investasi} - \text{Investasi Awal}}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

2.4 Good Corporate Governance (GCG)

Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem, aturan, atau kerangka yang ada dalam perusahaan untuk mengelola hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui penerapan kontrol, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya peran pemegang saham dalam memastikan kesuksesan perusahaan (Fangestu et al., 2020).

Good Corporate Governance juga mencakup prinsip dasar dan mekanisme yang mengarahkan proses manajemen perusahaan guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas. Praktik-praktik ini bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, sembari memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan dan standar etika bisnis (Yanti, 2023).

Menurut Damayanti et al. (2021), GCG adalah aturan yang mengatur interaksi dengan pihak berkepentingan, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan temuan Lee & Lukman (2023), tata kelola perusahaan yang efektif mengatur hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, dan komisaris, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) dalam Aslida et al. (2024), corporate governance didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, terkait dengan hak dan kewajiban perusahaan.

Menurut Kristian dan Yopi Gunawan (2018:158) dan dalam Astri dan Arya (2020), prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut :

1. **Transparansi (transparency)**

keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan yang relevan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua pihak dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.

2. **Akuntabilitas (accountability)**

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. **Pertanggungjawaban (responsibility)**

Memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar etika yang tinggi.

4. **Kemandirian (indenpendency)**

yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. **Kewajaran (fairness)**

Memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan, baik pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat.

Menurut Idayanti & Hasni (2022), Good Corporate Governance adalah sistem dan metode pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham serta memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, GCG memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengurangi konflik keagenan yang mungkin timbul antara pemegang saham dan manajer (Meckling, 1976) dalam Jonathan Julian (2024). Salah satu peran utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen, yang pada gilirannya mendorong terciptanya pengawasan yang lebih efektif. Proses monitoring ini bertujuan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan bagi para pemegang saham.

Kepemilikan Institutional dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan (Basuki & Siregar, 2017, dalam Jonathan Julian, 2024). Selain itu, kepemilikan manajerial juga menggambarkan situasi di mana seorang manajer menjalankan peran ganda, yaitu sebagai manajer sekaligus pemegang saham (Alamsyah, 2016, dalam Jonathan Julian, 2024).

Kepemilikan Manajerial dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{saham yang dimiliki direksi dan komisaris}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

3. Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi dengan tujuan untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memantau pelaksanaan tugas auditor perusahaan. Peran utama komite audit adalah mendukung komisaris dan dewan pengawas. Komite ini diharapkan dapat bertindak secara independen, berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dengan perusahaan, sekaligus menjadi jembatan antara fungsi pengawasan dewan komisaris dan auditor internal.

Komite Audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Komite Audit : Jumlah Komite Audit

4. Ukuran Dewan Direksi

Keberadaan Dewan Direksi telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI yang berlaku sejak 1 Juli 2000 (Jonathan Julian, 2024). Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk memiliki Dewan Direksi yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Dewan Direksi harus terdiri dari anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya, atau pemegang saham pengendali, serta harus bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi independensi atau kemampuannya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan secara eksklusif.

Dewan Direksi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Dewan Direksi : jumlah anggota dewan direksi

5. Dewan Komisaris Independen

Menurut Sukrisno (n.d.) dalam Istiqomah (2024), Komisaris independen adalah individu yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen, termasuk pemegang saham minoritas. Individu yang ditunjuk ini tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan pihak tertentu dan dipilih semata-mata berdasarkan pengetahuan profesional, pengalaman, serta keahlian yang dimiliki, agar dapat menjalankan tugasnya sepenuhnya demi kepentingan perusahaan.

Dewan Komisaris Independen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah keseluruhan komisaris}}$$

2.5 Intellectual Capital

Menurut Landion & Lastanti (2019) modal intelektual adalah aset tidak berwujud yang meliputi informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang digunakan untuk menciptakan nilai tambah atau kekayaan bagi perusahaan. Modal intelektual juga dapat diartikan sebagai laporan yang digunakan untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan, yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna, terutama untuk memenuhi ekspektasi investor (Septiyuliana, 2016). Sementara

itu, Andika & Astini (2022) menyatakan bahwa intellectual capital merupakan sumber daya pengetahuan yang mencakup karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menciptakan nilai (value creation).

Intellectual capital adalah modal pengetahuan yang kuat, manajemen yang terorganisir, serta adanya semangat kerja sama yang memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam situasi sulit dan menjalankan pengelolaan keuangan yang amanah (Bagdaludin, 2019). Modal intelektual dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui kekayaan intelektual dan pengalaman, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan. Intellectual capital tidak hanya mencakup goodwill atau paten yang biasanya dicantumkan dalam neraca, tetapi juga meliputi kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, inovasi yang dihasilkan, sistem komputer dan administrasi, serta penguasaan teknologi, yang semuanya merupakan komponen dari intellectual capital (Putri dan Nuzula, 2019).

Intellectual capital terdiri dari beberapa komponen yang merupakan pengembangan dari definisi dan menjadi bagian dari variabel ini. Stewart (2002:79-81) dalam Afni dan Uci (2021) serta Risal et al., (2022) mengklasifikasikan intellectual capital ke dalam tiga bagian utama, yaitu :

1. Modal Manusia (Human Capital)

Modal manusia sangat penting karena human capital berfungsi sebagai sumber daya yang mencakup inovasi, pembaruan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

2. Modal Struktural (Structural Capital)

Menurut Stewart (2002), modal struktural mencakup elemen-elemen yang memfasilitasi pemanfaatan sumber daya manusia secara berulang untuk menciptakan nilai tambah. Modal ini melibatkan sistem database dan

teknologi canggih. Sementara itu, Astuti dan Sabeni (2005) menjelaskan bahwa modal struktural merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang mencakup pengetahuan yang tetap ada dalam organisasi tersebut. Intellectual Capital jenis ini terdiri dari berbagai aspek seperti rutinitas, prosedur, sistem, budaya, dan database perusahaan.

3. Modal Pelanggan (Customer Capital)

Modal pelanggan merujuk pada nilai yang terkandung dalam hubungan yang dibangun antara organisasi dengan individu atau entitas yang terlibat dalam bisnisnya, seperti pelanggan dan pemasok.

4. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

Metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) mulai dikembangkan pada tahun 1997 oleh Pulic, dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud (tangible assets) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. Pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan metode VAIC.

Dalam penelitian ini, Intellectual Capital diukur berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari VACA, VAHU, dan STVA. Gabungan dari ketiga nilai tambah tersebut disebut VAIC, yang dikembangkan oleh Pulic (1998, 1999, 2000). Penjelasan mengenai rumus dan langkah-langkah perhitungan VAIC dapat ditemukan dalam penelitian oleh Berliana & Hesti (2021) dan Astri & Arya (2020), sebagai berikut :

1. Menghitung Nilai Tambah atau Value Added (VA)

VA dihitung sebagai selisih antara output dan input.

$$VA = \text{Output} - \text{Input}$$

Keterangan :

Output : Total penjualan dan pendapatan lain

Input : Beban penjualan dan biaya-biaya lain (selain beban karyawan)

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA)

VACA adalah indikator untuk VA yang dibuat oleh satu unit dari modal fisik. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh masing-masing unit CE terhadap value added organisasi.

$$VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan :

CE : Capital Employed, (total ekuitas)

3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU)

Vahu adalah indikator berapa banyak VA yang dapat diproduksi dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja.

Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh masing-masing rupiah yang diinvestasikan pada HC terhadap value added organisasi.

$$VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan :

HC : Human Capital, beban tenaga kerja

4. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai.

$$STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan :

SC : Structural Capital : VA – HC

5. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indicator). VAIC merupakan penjumlahan dari ketiga komponen sebelumnya, yaitu :

$$VAIC = VACA + VAHU + STVA$$

2.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kewajiban perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Secara umum, CSR merujuk pada tindakan perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat lokal dan masyarakat luas, termasuk pemangku kepentingan lainnya. CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada semua pihak yang terlibat, dengan melaksanakan program-

program yang memberikan manfaat. Saat ini, CSR bukan lagi sekadar kebijakan sukarela bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial, tetapi telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi (Sari, 2023).

Menurut Resturiyani (2012) dalam Supami et al. (2020), CSR merupakan konsep integrasi yang menghubungkan aspek bisnis dengan aspek sosial, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan menganggap masyarakat sebagai pihak yang setara dengan pemegang saham, yang harus dilayani secara berkelanjutan. Tanggung jawab sosial atau CSR adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasionalnya, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan dampak lingkungan, seperti polusi, limbah, serta keamanan produk dan tenaga kerja.

Indonesian Business Links menggambarkan CSR sebagai "tanggung jawab perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi positifnya kepada semua pemangku kepentingan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan." Berdasarkan berbagai definisi tersebut, CSR adalah kewajiban perusahaan untuk memenuhi komitmen dalam aktivitas bisnis yang berlandaskan nilai etis, dengan tujuan mencapai keseimbangan baik di sisi internal maupun eksternal, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Menurut Sari (2021) dan Safiga & Prisila (2024), corporate social responsibility (CSR) dapat diukur dengan menggunakan 91 indikator dari GRI G4, yaitu Global Reporting Index (GRI) G4, yang terbagi ke dalam tiga kategori utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penghitungan CSR dilakukan dengan menggunakan variabel dummy, di mana setiap item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan

diberikan nilai 0, sementara setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan diberikan nilai 1. Rumus perhitungan indeks CSR adalah sebagai berikut :

$$CSRDI J = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSDIj : Indeks corporate social responsibility perusahaan

Nj : Jumlah item CSR (91 item GRI G4)

$\sum X_{ij}$: Jumlah CSR yang diungkapkan perusahaan

Menurut Faurani & Callista Holivianto (2024) Corporate Social Responsibility dapat diukur menggunakan nilai ekonomi yang dihasilkan suatu perusahaan tersebut. Rumus Perhitungan adalah sebagai berikut :

$$CSR_{\text{nilai ekonomi}} = \text{LN (Laba Sebelum Pajak)}$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/Indikator	Hasil
1.	Martin Kyere, and Marcel Ausloos (2021). ISSN 1076-	Corporate governance and firms financial performance in the United	Variabel Independen : X1. Insider shareholder X2. Board size X3. Board	- insider shareholder tidak memiliki pengaruh

	9307 Q2	Kingdom	independence X4. CEO duality X5. Audit committees Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan Variabel Control : - Firm Size - Leverage	yang signifikan terhadap kinerja keuangan. - ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - dewan independen, berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - CEO duality tidak berpengaruh signifikan
--	------------	---------	--	--

				terhadap kinerja keuangan. - komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	Nguyet Thi Nguyena dan Van Thi Nghiem (2023). ISSN 1088-6931 Q4	Intellectual capital and financial performance of industrial firms in emerging countries: Empirical evidence from Vietnam.	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	- Intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Wafa Ghardallou and Noha Alessa (2022). ISSN 2071-	Corporate Social Responsibility and Firm Performance in GCC Countries:	Variabel Independen : X1. Corporate Social Responsibility (CSR) Variabel Dependen :	- CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja

	1050 Q2	A Panel Smooth Transition Regression Model	Y. Kinerja Keuangan Variabel Control : - Firm Size - Leverage - Sales Growth - Tangible	keuangan.
4.	Hani Oktafia Putri, Liliek Nur Sulistiyowati, dan Diah Santi Hariyani (2023).	Pengaruh Modal Intelektual, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Kompas 100).	Variabel Independen : X1. Modal Intelektual X2. Corporate Social Responsibility X3. Corporate Governance Variabel Dependen : Y. Kinerja Kuangan	- Modal Intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - Corporate Governance berpengaruh

				positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Amilatul Zulfa dan Marsono (2023).	PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital X2. Corporate Social Responsibility X3. Good Corporate Governance Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	- Intellectual Capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - Good Corporate Governance berpengaruh positif

				signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Risal Rinofah, Pristin Prima Sari, dan Erni Dwijayanti (2022).	Pengaruh Intellectual Capital, CSR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital X2. Corporate Social Responsibility X3. Good Corporate Governance Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	- Intellectual Capital dengan uji t tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - CSR dengan uji t berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. - GCG dengan uji t berpengaruh signifikan terhadap

				kinerja keuangan.
7.	Lesatanova Tricahya Avilya dan Imam Ghozali (2022).	PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020).	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital X2. Good Corporate Governance X3. Corporate Social Responsibility Variabel Mediasi : M. Manajemen Laba Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	- Intellectual Capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh

				signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan.
8.	Safiga Aulia Romadon dan Prisila Damayanty (2024).	THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON COMPANY PERFORMANCE.	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital X2. Good Corporate Governance X3. Corporate Social Responsibility Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	- IC tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. - CSR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

9.	Dinta Elpri Noptian dan Fadilla Cahyaningtyas (2024).	DETERMINASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN : ANALISIS INTELLECTU AL CAPITAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILI TY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN.	Variabel Independen : X1. Intellectual Capital X2. Corporate Social Responsibility X3. Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen : Y. Kinerja Kuangan	- Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - DKI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
10.	Supami Wahyu	HUBUNGAN INTELLECTU	Variabel Independen : X1. Intellectual	- secara simultan

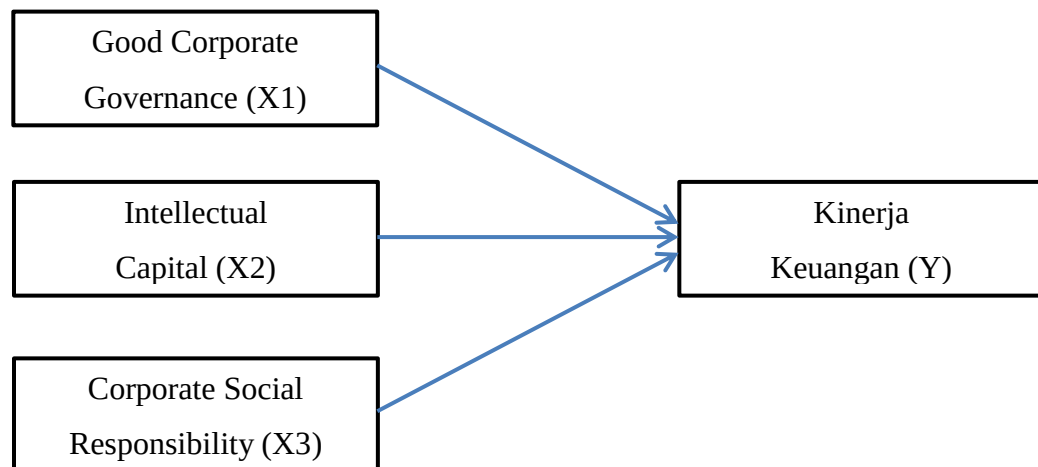
	Setiyowati dan Mardiana (2020).	AL CAPITAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN	Capital X2. Corporate Social Responsibility X3. Good Corporate Governance Variabel Dependen : Y. Kinerja Keuangan	dan parsial IC berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - secara simultan dan parsial CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - secara simultan dan parsial GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
--	---------------------------------	--	---	---

2.8 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah proses menyusun dan mengorganisasi pertanyaan penelitian, serta mendorong penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi,

termasuk konteks dan penyebab yang memotivasi peneliti untuk melaksanakan studi tersebut. Sebuah kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti sebagai isu yang penting (McGaghie dalam Hayati, 2020).

Penulis menyajikan kerangka pemikiran yang menjelaskan relasi dari variabel bebas (independen) yaitu Good Corporate Governance (GCG), Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan sebagai variabel tetap (dependen), Kerangka pemikiran ini dituangkan dalam model penelitian yang ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.9 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka dan merupakan deskripsi awal dari

permasalahan yang akan diuji lebih lanjut. Hipotesis akan diuji berdasarkan hasil analisis data empiris; jika data mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut akan diterima, dan sebaliknya. Hipotesis-hipotesis ini dibentuk berdasarkan penelitian sebelumnya serta teori dan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut beberapa hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini :

2.9.1 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance merupakan sistem dan metode pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait dengan perusahaan (Idayanti & Hasni, 2022).

Hubungan Teori Keagaenan dengan Good Corporate Governance keduanya berkaitan dengan cara mengelola hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), serta bagaimana mengatasi potensi konflik kepentingan yang bisa muncul antara keduanya. Teori Agensi mendorong berkembangnya konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan bisnis sebagai solusi untuk mengatasi masalah keagenan.

GCG dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan agar mereka mendapatkan kembali hak kepemilikan mereka dengan adil, serta memastikan manajemen bekerja sesuai dengan kepentingan perusahaan (The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004). Selain itu, GCG diharapkan menjadi sarana untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan memperoleh imbal hasil atas investasi yang dilakukan (Herawati, 2008) dalam Ermalyani & Darjono (2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

2.9.2 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan

Intellectual capital adalah sumber daya pengetahuan yang terdiri dari karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai (value creation) bagi perusahaan, menurut Andika & Astini (2022). Intellectual capital juga dapat diartikan sebagai modal pengetahuan yang superior, manajemen yang terorganisir, serta adanya sifat saling membantu, yang memungkinkan perusahaan bertahan meskipun menghadapi defisit dan mengelola dana dengan amanah (Bagdaludin, 2019). Intellectual capital atau aset tidak berwujud sering dianggap setara, karena keduanya tidak memiliki bentuk fisik. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa istilah intellectual capital dan aset tidak berwujud sering digunakan secara bergantian (Bukh, 2003). Di sisi lain, Boekestein (2006) menyatakan bahwa intellectual capital merupakan salah satu komponen dari aset tidak berwujud (Afni dan Uci, 2021).

Teori stakeholder menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, komunitas, dan pemerintah. Dalam konteks intellectual capital, teori ini sangat relevan karena pengelolaan dan pengembangan sumber daya tidak berwujud yang menjadi bagian dari intellectual capital berkaitan erat dengan kepentingan berbagai stakeholder. Oleh karena itu, teori stakeholder menyoroti bahwa intellectual capital adalah aset strategis yang berkontribusi tidak hanya pada keberhasilan finansial perusahaan, tetapi juga pada penciptaan nilai bagi seluruh stakeholder. Pengelolaan intellectual capital yang baik memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan, meningkatkan daya saing, dan mendukung keberlanjutan di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinta & Fadilla (2024), Hani Oktafia et al., (2023), Afni & Uci (2021), dan Agam Mei Yudha (2021) menyatakan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : diduga Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.

2.9.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Setiyowati & Mardiana (2020), CSR adalah konsep integratif yang menghubungkan aspek bisnis dan sosial yang berjalan seiring dengan tujuan perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) mencerminkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat untuk memberikan kontribusi jangka panjang, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekitar wilayah operasional perusahaan. Konsep ini secara tidak langsung membantu membangun citra positif perusahaan (Hery, 2012). Artinya, perusahaan memandang masyarakat sebagai pemegang saham yang harus dilayani secara berkelanjutan.

Berdasarkan teori stakeholder perusahaan yang menjalankan CSR secara aktif menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Pelaksanaan CSR yang baik dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan stakeholder. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa perhatian perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan stakeholder dapat membantu mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai langkah strategis untuk memenuhi ekspektasi stakeholder terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, mencakup aspek seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinta & Fadilla (2024), Hani Oktafia et al., (2023), Agam Mei Yudha (2021), dan Karina Odia (2021) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : diduga Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan.